

ABSTRAK

Redistribusi tanah ialah beberapa tanah yang berada di penguasaan oleh negara dilakukan pembagian kemudian dinyatakan secara tegas menjadi obyek *landreform* dan diberikan kepada petani yang sudah dirasa memenuhi persyaratan berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan konflik dengan aturan lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang membahas mengenai redistribusi lahan objek reforma agraria.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode jenis hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (Statue approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan redistribusi lahan objek reforma agraria yang dimuat dalam PP tentang Badan Bank Tanah dengan PerPres tetntang reforma agraria yang mengakibatkan timbulnya konflik aturan antara dua peraturan tersebut dalam pengaturan mengenai pengadaan tanah dan redistribusi lahan. PP no 64 tahun 2020 tentang Bank Tanah, reforma agraria hanya mendapatkan minimal 30% saja dari tanah negara. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas tanah negara yang menjadi objek reforma agraria yang sekarang hak masyarakat dibagi atau diberikan kepada investor.

Kata Kunci :Redistribusi lahan pertanian, reforma agraria.

ABSTRACT

Land redistribution is that some land that is controlled by the state is divided and then expressly declared to be the object of land reform and given to farmers who are deemed to have met the requirements based on applicable regulations. Then there are laws and regulations made by the government that cause conflicts with other regulations, namely Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency with Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform which discusses the redistribution of land objects for agrarian reform.

The method in this research is using the normative legal type method, with a statutory approach.

The results of this study indicate that the regulation of land redistribution for the object of agrarian reform contained in the PP on Land Bank Agency with the Presidential Regulation on agrarian reform resulted in a conflict of rules between the two regulations in the regulation regarding land acquisition and land redistribution. PP No. 64 of 2020 concerning Land Banks, agrarian reform only gets a minimum of 30% from state land. This has resulted in the loss of community rights that should have obtained rights to state land which is the object of agrarian reform, which now community rights are divided or given to investors.

Keywords: Redistribution of agricultural land, agrarian reform.